

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan dividen menjadi elemen yang paling stabil dan dapat di prediksi oleh perusahaan. Sebagian besar perusahaan membayar dividen setelah mencapai tahap kematangan bisnis dan ketika tidak ada lagi kesempatan investasi yang menguntungkan perusahaan (Sartono,2010). Permasalahan rumit yang terjadi di perusahaan dalam pembagian dividen adalah perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan yang sering disebut masalah keagenan. Pemegang saham menginginkan dividen dibayarkan sebesar-besarnya, akan tetapi pihak manajemen perusahaan (manajerial) menginginkan laba perusahaan ditahan untuk investasi kembali (Sari dan Sudjarni, 2015). Bagi perusahaan jika membagikan laba dalam bentuk dividen akan mengurangi sumber dana internal, tetapi jika menahan laba maka kemampuan dana internal semakin besar dan dapat membiayai kegiatan perusahaan sehingga mengurangi ketergantungan dana eksternal dan memperkecil resiko perusahaan (Marlina dan Danica, 2009).

Fenomena yang terjadi dalam pembagian dividen banyak terjadi di Indonesia, yaitu kasus PT. Freeport, dimana perusahaan tambang terkemuka di dunia selama tiga tahun yaitu tahun 2012-2014 tidak membagikan dividen kepada pemegang saham. Juru bicara Freeport Indonesia, Daisy Primayanti mengatakan bahwa Freeport masih fokus untuk investasi tambang bawah tanah (*underground mining*) yang membutuhkan investasi besar senilai 15 miliar dollar AS (Kompas,2015). Fenomena lain yang terjadi yaitu pada PT Sekar Laut Tbk, perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan yang beroperasi di Sidoarjo, Jawa Timur tidak membagikan dividen kepada pemegang saham

selama sepuluh tahun, pada tahun 2002-2011. Direktur Keuangan Sekar Laut, John C. Ghozal mengatakan pertumbuhan penjualan tahun 2011 masih jauh dari harapan, akan tetapi pihaknya akan tetap membagikan dividen meskipun baru sebesar Rp 2 per lembar saham atau Rp 1,38 miliar (Kabarbisnis,2012). Berdasarkan fenomena tersebut, terdapat dua dampak berlawanan, yaitu jika dividen dibagikan kepada investor, maka kepentingan perusahaan untuk membantu permodalan dan kegiatan operasi akan terabaikan. Jika semua laba ditahan, maka kepentingan pemegang saham juga terabaikan. Hal ini menyebabkan konflik antara manajer dan pemegang saham (investor).

Kebijakan dividen tergambar pada *Dividend Payout Ratio (DPR)*, yaitu presentasi laba yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai, yang berarti semakin besar presentase laba yang digunakan maka semakin sedikit penggunaan dana dalam operasi perusahaan (Farisah,2015). Salah faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah struktur kepemilikan. Kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak perusahaan atau manajer disebut sebagai kepemilikan manajerial (Christiawan dan Tarigan, 2007). Perusahaan dengan kepemilikan manajerial, sebagai pemegang saham tentunya akan menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dan pemegang saham. Kepemilikan saham oleh manajemen berkaitan erat dengan kontrol dan monitoring atas perilaku manajemen sebagai konsekuensi dari adanya masalah keagenan. Penelitian tentang kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen oleh Ismiati dan Yuniati (2017), Sari dan Budiarsih (2016) menunjukkan hasil berpengaruh negatif. Hal ini berarti apabila kepemilikan saham oleh pihak manajerial meningkat akan menurunkan kebijakan dividen. Hasil berbeda

ditemukan pada penelitian Jayanti *et al* (2017) yang menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen.

Selanjutnya yaitu adanya kepemilikan institusional, kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusi atau perusahaan lain. Adanya kepemilikan institusional dapat digunakan sebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan. Kepemilikan institusional membuat manajer seolah merasa diawasi sehingga tidak menggunakan hutang untuk investasi atau dikonsumsi secara pribadi (Ismiati, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Sumartha (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen, hal ini menunjukkan semakin besar proporsi kepemilikan institusional maka akan semakin kecil dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati *et al* (2015) menjelaskan terdapat hubungan yang positif signifikan antara kepemilikan institusional dan kebijakan dividen. Hasil berbeda juga ditemukan pada penelitian Sari dan Budiarsih (2017) dan Ismiati dan Yuniati (2017) bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen.

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur dengan cara melihat dari total asset perusahaan tersebut. Menurut Weston dan Copeland (1996:100) dalam Putri (2014) menjelaskan bahwa perusahaan yang besar atau mapan cenderung memberi tingkat pembayaran dividen yang lebih tinggi daripada perusahaan kecil. Perusahaan yang besar dan mapan memiliki akses mudah menuju pasar modal. Kemudahan tersebut berarti perusahaan tersebut cukup fleksibel dan mampu untuk memperoleh dana yang besar sehingga perusahaan memiliki *dividen pay out ratio* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil (Hanayani dan Hadinugroho, 2009). Penelitian

yang dilakukan oleh Putri (2014), Hikmah dan Astuti (2013) memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kebijakan dividen, akan tetapi Farisah (2015) memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan dan Darmayanti dan Mustanda (2016) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen.

Faktor yang menjadi pertimbangan penentu kebijakan dividen selanjutnya adalah profitabilitas. Zahidda (2017) menjelaskan besar kecilnya profitabilitas suatu perusahaan berdampak pada besar kecilnya dividen yang akan diberikan. Semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividen kepada pemegang saham (Pasadena, 2013). Astuti dan Nurpadila (2015) menjelaskan bahwa perusahaan yang rugi akan mengalami kesulitan dalam pembayaran dividen. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Zahidda (2017) dan Farisah (2015) memperoleh hasil bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Tetapi hasil dari Hikmah dan Astuti (2013) menjelaskan bahwa profitabilitas terdapat pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kebijakan dividen.

Menurut Riyanto (2001:267) salah satu faktor lain yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah kebijakan hutang. Kebijakan hutang yang diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Peningkatan hutang akan mempengaruhi besar kecilnya laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham termasuk dividen yang diterima karena kewajiban membayar utang lebih diutamakan daripada pembagian dividen. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014), Rahmawati *et al* (2014),

Bansaleng *et al* (2014), Pramana dan Sukartha (2015), Sari dan Sudjarni (2015) memperoleh hasil bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan dividen.

Kesempatan investasi atau *investment opportunity set* (IOS) berfungsi sebagai prediktor pertumbuhan perusahaan (Sumarni *et al*, 2014). *Investment opportunity set* dapat dijadikan dasar untuk menentukan klasifikasi pertumbuhan masa depan perusahaan. Keown *et al* (2010:214) dalam Putri (2014) menyatakan ketika peluang investasi perusahaan naik, rasio pembayaran dividen harus turun, terdapat hubungan timbal balik antara besarnya investasi dengan rasio pembayaran dividen. Hal ini sesuai dengan penelitian Sumarni *et al* (2014) bahwa IOS berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen. Hasil yang berbeda ditemukan dalam Dhiti (2012) dan Anam *et al* (2016) bahwa IOS berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen.

Penelitian ini bertujuan mengkaji kembali hipotesis pengaruh variabel-variabel yang mempengaruhi kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang dilakukan oleh Deni *et al* (2016) dengan mengganti subjek penelitian menjadi perusahaan sektor industri barang konsumsi (*Consumer Goods*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perbedaan selanjutnya adalah tahun penelitian. Pada penelitian sebelumnya mengambil sampel tahun 2007-2011, sedangkan penelitian selanjutnya mengambil sampel tahun 2012-2016. Alasan dalam penelitian ini mengambil perusahaan sektor industri barang dan konsumsi (*Consumer Goods*) karena memiliki prospek yang baik dan memiliki peluang yang terus berkembang, dimana produknya sangat diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari. Keunggulan lain dari sektor industri barang dan konsumsi adalah

tingkat permintaan yang inelastik, artinya barang konsumsi tetap dibutuhkan masyarakat, walaupun harganya naik.

Akan tetapi perkembangan perusahaan sektor barang dan konsumsi tidak didukung oleh jumlah perusahaan yang membagikan dividen setiap tahunnya, dimana jumlah perusahaan sektor barang dan konsumsi hanya 20 perusahaan dari 42 perusahaan yang membayarkan dividen selama periode 2012-2016. Kondisi ini mencerminkan sekitar 47% perusahaan sektor barang dan konsumsi yang stabil membayarkan dividen.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang masih terdapat ketimpangan hasil penelitian, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, maka peneliti tertarik untuk menguji dengan menggunakan variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan hutang, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kesempatan investasi. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang dan Konsumsi (*Consumer Goods*) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)”**

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen?

3. Apakah ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen?
5. Apakah kebijakan utang berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen?
6. Apakah *Investment Opportunity Set* berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Kepemilikan managerial berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen
2. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen
3. Ukuran perusahaan berpengaruh (*size*) positif terhadap kebijakan dividen
4. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen
5. Kebijakan utang berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen
6. *Investment Opportunity Set* berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan wawasan dan bukti empiris mengenai kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, profitabilitas, kebijakan hutang, kesempatan investasi terhadap kebijakan dividen serta dapat digunakan referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang bermanfaat bagi pembaca khususnya investor atau pialang saham dalam mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham sehubungan dengan harapannya terhadap dividen yang dibayarkan

- b. Bagi para pemimpin dan pengambil kebijakan didalam perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penentuan kebijakan dividen yang akan diambil pada saat diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).